

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

Awwaliyah Nur Azizah

awwazizah@gmail.com

Dini Widyawati

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of budget target clarity, human resources quality, and auditing system on the performance accountability of Surabaya government agencies in which reflected is accountability of the carried out activities. The research was quantitative. Moreover, the data collection techniques used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 80 respondents in 21 Local Official Organizations of Surabaya government agencies as sample. Furthermore, the instrument was questionnaires, which were distributed directly to respondents. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Package for Sosial Science) 23. The research result concluded budget target had positive effect on the performance accountability of Surabaya government agencies. Likewise, human resources quality as well as auditing system had positive effect on the performance accountability of Surabaya government agencies. Generally, this result was in accordance with the hypotheses which had been formulated within the research.

Keywords: KSA, KSDM, SP, AKIP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya dimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang berdasarkan kriteria. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 80 responden yang berada di 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini

Kata kunci: KSA, KSDM, SP, AKIP

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana dari masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk mempunyai kinerja yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat yaitu dengan memberikan kepercayaan dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Organisasi sektor publik mempunyai peran kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan secara transparan dan memberikan kualitas informasi yang baik. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi atau

kemampuan daerah masing-masing. Salah satu masalah yang termasuk dalam perkembangan organisasi sektor publik yaitu semakin tingginya tuntutan pelaksanaan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja sektor publik untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan publik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk sebaik-baiknya pelayanan publik yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan suatu bentuk perwujudan perubahan penyelenggaraan organisasi yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Optimalnya sistem pengukuran kinerja bergantung pada kualitas pelayanan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula, sistem pengukuran kinerja digunakan sebagai monitoring kegiatan. Menurut Wakhyudi (2007) menyatakan bahwa diterapkannya SAKIP melalui pembuatan target kinerja yang disertai dengan indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan suatu instansi pemerintah. Kota Surabaya mampu meningkatkan nilai SAKIP dari tahun 2016 yang mendapat nilai B menjadi BB pada tahun 2019. Dengan adanya penerapan SAKIP terbukti pada tahun 2018 mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. Wilayah II dapat menghemat anggaran melalui SAKIP mencapai Rp 22,3 triliun dan secara nasional tahun 2018 berhasil menghemat Rp 65,1 triliun. Pemerintah diwajibkan memenuhi akuntabilitas dimana harus memperhatikan beberapa hal yaitu anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Anggaran pemerintah daerah tidak lepas dari pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas. Menurut Hidayattullah dan Herdjiono (2014) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif berupa satuan uang yang memiliki jangka waktu tertentu. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan sasaran yang akan dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran memberikan kemudahan bagi para pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Tingkat kinerja dalam instansi pemerintah dapat tercapai apabila sasaran anggaran diketahui. Dalam keberhasilan kejelasan sasaran anggaran diharapkan akan tercapainya tugas suatu organisasi sehingga akuntabilitas publik dapat terwujud. Kejelasan sasaran anggaran yaitu sejauh mana tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara spesifik dan jelas yang mempunyai tujuan untuk anggaran tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut dimana sesuai dengan Kenis, 1979 (dalam Putra, 2013). Ketidakjelasan sasaran anggaran dapat mengakibatkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, sehingga menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Laksana dan Handayani, 2014). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang relevan dan penting dalam lingkup pemerintahan karena berdampak pada akuntabilitas pemerintah. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi *et al.* (2018) yang menyatakan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Warisno, 2009 (dalam Juita, 2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja SKPD dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan komunikasi. Kinerja organisasi bergantung pada sumber daya manusia yang ada didalamnya, baik individu maupun tim. Sumber daya manusia merupakan asset bagi organisasi dan merupakan salah satu sumber yang mampu memberikan pengaruh dari adanya peristiwa dan dampak dalam melaksanakan suatu kinerja. Kinerja yang dicapai dengan baik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlepas dari pengaruh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, sehingga harus dipastikan dalam mengelola sumber daya manusia harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia

dapat dikatakan berkualitas apabila seseorang tersebut mempunyai bekal pendidikan, latihan dan pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang diterima (Widodo, 2009 dalam Kharis, 2010). Sumber daya manusia sebagai pengatur pemerintahan daerah erat kaitannya dengan kualitas organisasi sektor publik. Arsyiati (2008) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang mengelola keuangan dalam melaksanakan proses akuntansi seharusnya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan keuangan negara dan perbendaharaan negara, apabila tidak diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dapat menghambat proses pencairan dana. Hal ini akan berdampak pada aktivitas-aktivitas yang akan mempengaruhi kinerja instansi. Dengan adanya hal tersebut Rahayu *et al.* (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah, dan sebaliknya semakin rendah kualitas sumber daya manusia maka semakin rendah kinerja pemerintah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitinjak *et al.* (2019) yang menyatakan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas badan pusat statistik. akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mewujudkan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas kinerja, pemerintah mempunyai peran memperhatikan beberapa hal antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Menurut Mardiasmo (2009) agar laporan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah lebih akuntabel maka sebaiknya diperlukan keterlibatan antara pihak-pihak yang profesional dan independen untuk menilai laporan tersebut. Pemerintah selaku dana publik harus bisa menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya. Sistem pelaporan dibutuhkan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban dalam laporan yang harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawabannya beserta anggaran, sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan terhadap anggaran (Arifin, 2012). Menurut Suhaesti (2016) menyatakan bahwa adanya sistem pelaporan yang baik mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimbangan, sehingga sistem pelaporan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama *et al.* 2019) yang menyatakan hasil bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja OPD Kota Surabaya? (2) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja OPD Kota Surabaya? (3) Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja OPD Kota Surabaya? Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja OPD Kota Surabaya. (2) Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja OPD Kota Surabaya. (3) Untuk menguji pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja OPD Kota Surabaya

TINJAUAN TEORITIS

Kejelasan Sasaran Anggaran

Dalam organisasi sektor publik, anggaran memiliki peran penting terutama dalam organisasi pemerintahan. Anggaran organisasi sektor publik yang baik berisi informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan dan pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode akuntansi. Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan anggaran

sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Widodo, 2001 (dalam Kharis, 2010:8) sumber daya manusia yang berkualitas adalah seseorang yang mempunyai bekal pendidikan, latihan dan pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Apabila karyawan tidak memiliki kualitas sumber daya yang baik maka akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan dan akan memberikan dampak bagi institusi pekerja.

Sistem Pelaporan

Menurut Bastian (2010) menyatakan dalam organisasi sektor publik terdapat dua jenis pelaporan yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggung jawabkan sebagai perwujudan dari proses akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Mardiasmo (2009) menyatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian menurut Fathia (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menunjukkan hasil bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kedua, penelitian menurut Fauzan (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang menunjukkan hasil bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ketiga, penelitian menurut Fitriana *et al.* (2018) melakukan penelitian tentang Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang menunjukkan hasil bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Keempat, penelitian menurut Laksana (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Batang yang menunjukkan hasil bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

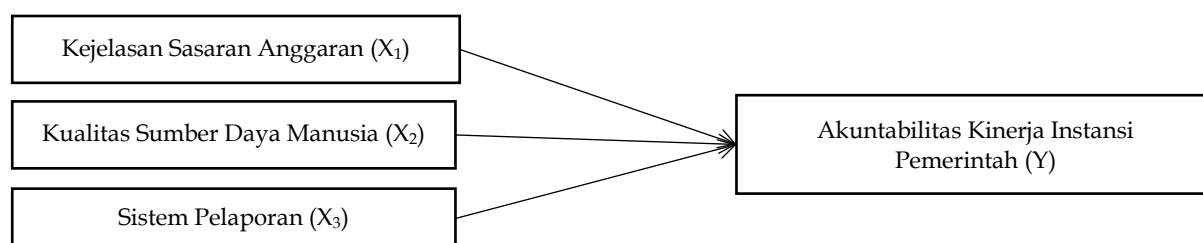
Kelima, penelitian menurut Pratama *et al.* (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menunjukkan hasil bahwa

kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keenam, penelitian menurut Sitinjak *et al.* (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang menunjukkan hasil bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Rerangka Konseptual

Organisasi perangkat daerah OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada kepala daerah. Adanya teori yang menjelaskan hubungan antara masyarakat (*pricipal*) dengan pemerintah (*agent*) dimana dalam hal ini pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban akan aktivitasnya kepada masyarakat yang telah memberi dana (*public fund*). Pemerintah harus mempunyai program prioritas yang berorientasi kepada kepentingan publik yaitu melalui kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sistem pelaporan. Anggaran dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sehingga tercapainya anggaran, tercapai pula sasaran pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam memberikan kontribusi yang optimal agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sistem pelaporan digunakan sebagai alat dalam memantau, mengendalikan, dan penyusunan anggaran di suatu instansi pemerintahan. Adapun model penelitian pada Gambar 1



Gambar 1
Model Penelitian
Sumber: Data primer diolah, 2020

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kualitas fungsi-fungsi pemerintah akan cenderung lemah jika kualitas anggaran daerah rendah. Sehingga anggaran daerah harus dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mencapai kinerja yang diharapkan, sehingga anggaran daerah yang telah direncanakan bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Kejelasan sasaran anggaran memberi kemudahan bagi pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas maka tingkat kinerja akan dicapai. Dari penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2017) dan Fauzan (2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan adanya hal ini maka kejelasan sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan dan program organisasi dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kualitas sumber daya adalah kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepadanya yang mempunyai bekal pendidikan, latihan dan pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Kualitas sumber daya manusia yang baik dibutuhkan dalam setiap organisasi pemerintah agar kontribusi kinerja yang diberikan optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah maka sumber daya manusia harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Individu yang ada dalam setiap organisasi harus mampu bekerja dengan maksimal, penuh inovasi, dan bersemangat dalam memberikan kontribusi kepada organisasi, sehingga dapat tercapainya kinerja organisasi yang baik. Dari penjelasan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Destriyani (2015) dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengaruh kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah, artinya dengan adanya hal ini maka semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah dan sebaliknya jika kualitas sumber daya manusia rendah maka semakin rendah pula kinerja pemerintah. Karena kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu penentu kinerja yang dihasilkan dan memberikan dampak bagi organisasi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan dalam memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan keuangan memiliki peran penting dalam lingkungan sektor publik untuk menciptakan akuntabilitas publik. Sistem pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan informasi atas tindakan yang dilakukan dalam penggunaan anggaran kepada pihak internal, eksternal dan pihak berkepentingan lainnya. Tujuan dari sistem pelaporan yaitu guna mengurangi tingkat ketidakpastian yang dialami oleh pengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah dan mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara positif. Dengan adanya laporan dapat digunakan sebagai gambaran pertanggungjawaban bawahan kepada atasan sehingga dapat memudahkan dalam menggambarkan tingkat pencapaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Dari penjelasan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana *et al.* (2018) dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengaruh sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Artinya dengan adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik data dalam bentuk angka yang digunakan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode kausal komparatif (*causal-comparative research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat dan pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah beberapa bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Untuk memperoleh sampel yang representatif dari suatu populasi maka diperlukan metode yang baik dalam pemilihan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (a) Memiliki jabatan sebagai kepala dinas, kepala bagian, kepala sub bagian, staff bagian keuangan dan staff yang berada dalam lingkungan OPD Kota Surabaya. (b) Dinas yang terdaftar dalam www.surabaya.go.id (c) Memiliki masa kerja minimal 5 tahun di masing-masing pemerintahan OPD Kota Surabaya yang dianggap mampu untuk menggambarkan keseluruhan kinerja instansi pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek (*self-report data*) yang merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang merupakan data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara yang menjadi sasaran penelitian (Sugiyono, 2014). Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban responden terhadap setiap item pertanyaan terstruktur yang terdapat dalam kuesioner yang diajukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016). Kuesioner diisi secara langsung oleh kepala dinas, kepala bagian keuangan, dan staf bagian keuangan yang didapat dari objek yang diteliti pada OPD Kota Surabaya.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen (bebas) yaitu kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan dan variabel dependen (terikat) yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis 1979, dalam Putra 2013).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dalam melaksanakan organisasi dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan (Wiley 2002, dalam Sibagariang 2013). Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan memberikan kontribusi yang optimal sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik pula dalam mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu sumber daya merupakan elemen organisasi yang sangat penting.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan sebuah rangkaian atau mekanisme yang sangat dibutuhkan untuk menyajikan laporan keuangan maupun laporan kinerja (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Sistem yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban. Untuk mengukur variabel ini menggunakan beberapa pertanyaan dimana hasil jawaban dari responden akan diukur menggunakan *skala likert*.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi yang diukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk memecahkan suatu masalah maupun pengujian hipotesis. Penelitian ini dalam teknik analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis menggunakan perhitungan SPSS yang bertujuan untuk menentukan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai demografi responden pada objek yang akan diteliti. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang menunjukkan hasil yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* dari masing-masing variabel (Ghozali, 2016)

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner dapat menungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 2016) menetapkan dasar analisis terhadap pengujian validitas apakah item valid atau tidak dapat dilakukan perbandingan yaitu apabila: (a) Jika r hitung $>$ r tabel, maka dapat dikatakan pertanyaan atau indikator yang digunakan valid, (b) Jika r hitung $<$ r tabel, maka dapat dikatakan pertanyaan atau indikator yang digunakan tidak valid

Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur indikator dari variabel atau konstruk yang ada pada kuesioner. Destriyani (2015) menyatakan uji reliabilitas

digunakan untuk mengetahui konsistensi dari hasil pengukuran yang dilakukan. Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai *Alpha Cronchbach* > 0,70 (Ghozali, 2016)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Penelitian ini menggunakan *normal probability plot* untuk membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Model regresi yang baik dan memenuhi asumsi normalitas adalah data yang tersebar mengikuti arah garis diagonal dan berada digaris diagonal atau grafik histogramnya menggambarkan pola distribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *kolmogorov - smirnov* (K-S). Populasi dapat dikatakan berdistribusi normal apabila mempunyai tingkat signifikannya 0,05, sebaliknya jika *kolmogorov - smirnov* menunjukkan tingkat signifikannya di bawah 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2016)

Uji Multikolineraitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi dapat dikatakan baik apabila antar variabel independen tidak terjadi adanya korelasi. Pengukuran multikolinearitas dapat diukur dengan menggunakan *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Variabilitas independen yang terpilih tetapi tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya dapat diukur oleh nilai *tolerance* (Ghozali, 2016). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan *Value Inflation Factor* (VIF) tinggi. Model regresi dapat dikatakan bebas multikolinearitas dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Apabila *nilai tolerance* > 0,10 atau *Value Inflation Factor* (VIF) < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. (b) Apabila *nilai tolerance* < 0,10 atau *Value Inflation Factor* (VIF) > 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengidentifikasi ada dan tidaknya pola tertentu dalam heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot*, dengan ketentuan: (a) Jika adanya pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (melebar, bergelombang, kemudian menyempit) maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. (b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan apabila variabel independen terdapat dua atau lebih variabel. Analisis regresi tidak hanya mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih tetapi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016). Bentuk umum persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$AKIP = \alpha + \beta_1 KSA + \beta_2 KSDM + \beta_3 SP + e$$

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R^2) mendekati 1 (semakin besar nilai R) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat sehingga model dapat dikatakan layak. Sebaliknya, jika koefisien determinasi (R^2) mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah sehingga dapat dikatakan kurang layak.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian atau tidak. Hasil uji F dapat dilakukan dengan menggunakan tabel ANOVA (Ghozali, 2016). Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: (a) Jika nilai $F >$ daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. (b) Menggunakan perbandingan antara nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Apabila nilai F hitung $>$ daripada nilai F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yaitu menggunakan angka profitabilitas signifikansi (Ghozali, 2016). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah: (a) H_0 : variabel independen (x) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (y), (b) H_a : variabel independen (x) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (y). Apabila nilai signifikansi $>$ 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSA	80	20	30	25,61	2,533
KSDM	80	30	50	41,70	3,757
SP	80	19	30	26,06	2,383
AKIP	80	26	40	33,86	2,907
Valid N (listwise)	80				

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji statistik deskriptif bahwa (1) kejelasan sasaran anggaran mempunyai nilai mean (rata-rata) sebesar 25,61 nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 30, sedangkan nilai standar deviasi dalam variabel ini sebesar 2,533 dimana menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data cukup beragam.

(2) kualitas sumber daya manusia mempunyai nilai mean (rata-rata) sebesar 41,70 nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 50, sedangkan nilai standar deviasi dalam variabel ini sebesar 3,757 dimana menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data cukup beragam. (3) sistem pelaporan mempunyai nilai mean (rata-rata) sebesar 26,06. nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 30, sedangkan nilai standar deviasi dalam variabel ini sebesar 2,383 dimana menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data cukup beragam.(4) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempunyai nilai mean (rata-rata) sebesar 33,86, nilai minimum sebesar 26 dan nilai maksimum sebesar 40, sedangkan nilai standar deviasi dalam variabel ini sebesar 2,907 dimana menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data cukup beragam.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap masing-masing pertanyaan yang membentuk variabel penelitian. Pertanyaan dikatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. Berdasarkan pengujian validitas dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 23 maka diperoleh hasil pada Tabel 2

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran

Variabel	Item pertanyaan	r hitung	r tabel ($\alpha=5\%$)	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	KSA1	0,683	0,2199	Valid
	KSA2	0,778	0,2199	Valid
	KSA3	0,653	0,2199	Valid
	KSA4	0,696	0,2199	Valid
	KSA5	0,696	0,2199	Valid
	KSA6	0,655	0,2199	Valid

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 pengujian validitas pada variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan valid karena nilai r hitung yang diperoleh lebih besar dari r tabel (r tabel diperoleh dengan rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $df = 80-2 = 78$ dengan $\alpha = 0,05$ jadi nilai r tabel adalah 0,2199. Sehingga menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kejelasan sasaran anggaran dinyatakan valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Kualitas Sumber Daya Manusia

Variabel	Item pertanyaan	r hitung	r tabel ($\alpha=5\%$)	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia	KSDM1	0,344	0,2199	Valid
	KSDM2	0,501	0,2199	Valid
	KSDM3	0,653	0,2199	Valid
	KSDM4	0,547	0,2199	Valid
	KSDM5	0,614	0,2199	Valid
Kualitas Sumber Daya Manusia	KSDM6	0,523	0,2199	Valid
	KSDM7	0,643	0,2199	Valid
	KSDM8	0,591	0,2199	Valid
	KSDM9	0,553	0,2199	Valid
	KSDM10	0,544	0,2199	Valid

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 pengujian validitas pada variabel kualitas sumber daya manusia menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan valid karena nilai r hitung yang diperoleh lebih besar dari r tabel (r tabel diperoleh dengan rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $df = 80-2 = 78$ dengan $\alpha = 0,05$ jadi nilai r tabel adalah 0,2199. Sehingga menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas sumber daya manusia dinyatakan valid.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Sistem Pelaporan

Variabel	Item pertanyaan	r hitung	r tabel ($\alpha=5\%$)	Keterangan
sistem pelaporan	SP1	0,670	0,2199	Valid
	SP2	0,710	0,2199	Valid
	SP3	0,767	0,2199	Valid
	SP4	0,613	0,2199	Valid
	SP5	0,581	0,2199	Valid
	SP6	0,598	0,2199	Valid

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 pengujian validitas pada variabel sistem pelaporan menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan valid karena nilai r hitung yang diperoleh lebih besar dari r tabel (r tabel diperoleh dengan rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $df = 80-2 = 78$ dengan $\alpha = 0,05$ jadi nilai r tabel adalah 0,2199. Sehingga menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel sistem pelaporan dinyatakan valid.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Variabel	Item pertanyaan	r hitung	r tabel ($\alpha=5\%$)	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	AKIP1	0,635	0,2199	Valid
	AKIP 2	0,557	0,2199	Valid
	AKIP 3	0,548	0,2199	Valid
	AKIP 4	0,661	0,2199	Valid
	AKIP 5	0,648	0,2199	Valid
	AKIP 6	0,616	0,2199	Valid
	AKIP7	0,529	0,2199	Valid
	AKIP8	0,593	0,2199	Valid

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 pengujian validitas pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan valid karena nilai r hitung yang diperoleh lebih besar dari r tabel (r tabel diperoleh dengan rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $df = 80-2 = 78$ dengan $\alpha = 0,05$ jadi nilai r tabel adalah 0,2199.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat diandalkan karena menghasilkan jawaban yang konsisten. Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan program SPSS 23, apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 maka dapat dikatakan bahwa item-item pertanyaan yang membentuk variabel penelitian adalah reliabel. Berdasarkan pengujian reliabilitas maka diperoleh hasil pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Kejelasan sasaran anggaran	0,784	0,70	Reliabel
Kualitas sumber daya manusia	0,745	0,70	Reliabel
Sistem pelaporan	0,735	0,70	Reliabel
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0,739	0,70	Reliabel

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

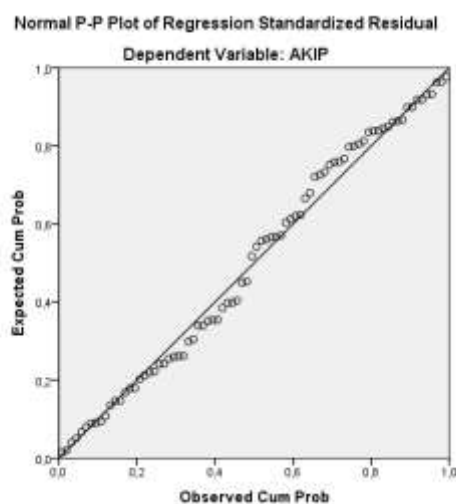
Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa pengujian reliabilitas dari semua variabel yang meliputi kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memberikan hasil yaitu nilai *cronbach's alpha* > 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini

dinyatakan reliabel atau layak digunakan untuk mengukut pernyataan atau indikator kuesioner penelitian

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Berdasarkan pengujian maka diperoleh hasil uji normalitas pada Gambar 2:



Gambar 2
Uji Normalitas

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitars garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dapat juga dilakukan menggunakan perhitungan statistik dengan uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Analisis statistik normalitas dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

		Standardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,79320162
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,067
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 hasil uji normalitas data dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini data berdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas residual dilihat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,200 dimana lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada atau tidaknya suatu korelasi yang signifikan antara variabel independen satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pengujian maka diperoleh hasil uji multikolinearitas pada Tabel 8:

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas

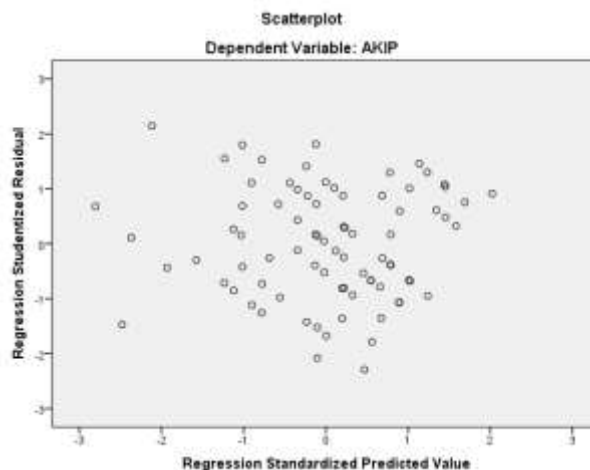
Model	Collinearity statistics	
	Tolerance	VIF
KSA	0,589	1,698
KSDM	0,619	1,614
SP	0,507	1,971

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8 maka dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance value* > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat adanya multikolinearitas antar variabel independen dimana menunjukkan memiliki dan dapat dikatakan bahwa model regresi layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 3:



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pemerintah Kota Surabaya. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh 80 responden di OPD Kota Surabaya diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23.0, maka dihasilkan persamaan regresi linear berganda dalam Tabel 9 berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	4,546	2,800	1,623	,109
KSA	,255	,113	2,251	,027
KSDM	,239	,073	3,257	,002
SP	,491	,128	3,820	,000

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 9 maka penjelasan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$AKIP = 4,546 + 0,255KSA + 0,239KSDM + 0,491SP + e$$

Dapat disimpulkan bahwa hasil persamaan regresi linier berganda dapat menunjukkan masing-masing variabel independen yang memiliki nilai koefisien regresi positif, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pada persamaan regresi linier berganda nilai konstanta (α) sebesar 4,546. Menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan bernilai 0, maka variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Surabaya sebesar 4,546. (2) Pada persamaan regresi linier berganda nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 0,255 yang artinya menunjukkan arah positif yang menggambarkan hubungan searah antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tanda positif menunjukkan bahwa jika kejelasan sasaran anggaran semakin baik maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya jika kejelasan sasaran anggaran buruk maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan mengalami penurunan. (3) Pada persamaan regresi linier berganda nilai koefisien regresi variabel kualitas sumber daya manusia adalah sebesar 0,239 yang artinya menunjukkan arah positif yang menggambarkan hubungan searah antara kualitas sumber daya manusia dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tanda positif menunjukkan bahwa jika kualitas sumber daya manusia semakin baik maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya jika kualitas sumber daya manusia buruk maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan mengalami penurunan. (4) Pada persamaan regresi linier berganda nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan adalah sebesar 0,491 yang artinya menunjukkan arah positif yang menggambarkan hubungan searah antara sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai R^2 mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berdasarkan pengujian maka diperoleh hasil uji determinasi (R^2) pada Tabel 10:

Tabel 10
Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,772 ^a	,597	,581	1,828

a. Predictors: (Constant), SP, KSDM, KSA

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi *R Square* sebesar 0,597 atau 59,7% yang mempunyai arti bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan. Sedangkan sisanya 40,3% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam model penelitian

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk menguji apakah model layak digunakan dalam penelitian atau tidak. Apabila nilai *F* hitung > *F* tabel maka dapat dikatakan bahwa model layak digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pengujian maka diperoleh hasil uji kelayakan model (Uji F) pada Tabel 11:

Tabel 11
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	375,920	3	125,307	37,489	,000 ^b
	Residual	254,030	76	3,343		
	Total	629,950	79			

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), SP, KSDM, KSA

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 11 dapat disimpulkan bahwa nilai *F*_{hitung} sebesar 37,489 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan nilai *F* tabel (*F* tabel diperoleh dengan rumus $F_{tabel} = k;n-k = 3;80-3 = 3;77 = 2,72$ $\alpha = 0,05$) maka nilai *F*_{hitung} > *F*_{tabel} artinya bahwa kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh antara variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sistem pelaporan secara individual terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan pengujian maka diperoleh hasil uji hipotesis (uji t) pada Tabel 12:

Tabel 12
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	4,546	2,800	1,623	,109
	KSA	,255	,113	2,251	,027

KSDM	,239	,073	3,257	,002
SP	,491	,128	3,820	,000

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 12 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (a) Pengujian hipotesis kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,027 yang berarti lebih dari 0,05 ($\alpha=5\%$) (b) Pengujian hipotesis kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti lebih dari 0,05 ($\alpha=5\%$) (c) Pengujian hipotesis sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih dari 0,05 ($\alpha=5\%$)

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa H_1 yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2017) dan Fauzan (2017) yang mengemukakan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Sebaliknya jika kejelasan sasaran anggaran rendah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran tersebut ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan untuk mempermudah dimengerti orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Mengetahui kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pegawai dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Kejelasan sasaran anggaran memberikan kemudahan bagi organisasi sektor publik dalam penyusunan kegiatan dimana dalam penyusunan kegiatan tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Bagi pegawai dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dapat menentukan target yang harus dicapai dan merencanakan apa saja yang harus dilakukan. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Tidak adanya kejelasan sasaran anggaran akan membuat pelaksana anggaran menjadi bingung sehingga dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Oleh karenanya, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas organisasi akan lebih mudah, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan demi terlaksananya akuntabilitas kinerja dapat tercapai. Agar terciptanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya maka anggaran pemerintah harus dinyatakan secara jelas kemana arah anggaran tersebut, sehingga penyimpangan terhadap anggaran mudah untuk dihindari.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa H_2 yang menyatakan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Destriyani (2015) dan Aisyah *et al.* (2017) yang mengemukakan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia dengan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah. Artinya bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Sebaliknya jika kualitas sumber daya manusia rendah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun. Kualitas sumber daya manusia merupakan seseorang yang mempunyai bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang telah diberikan. Kualitas sumber daya manusia dalam setiap organisasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dilingkungkannya, dan kualitas sumber daya manusia merupakan penentu berhasil atau tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia berperan penting dalam organisasi sektor publik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa H_3 yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana *et al.* (2018) dan Pratama *et al.* (2019) yang mengemukakan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya bahwa semakin baik sistem pelaporan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Sebaliknya jika sistem pelaporan rendah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun. Sistem pelaporan merupakan sistem yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuan sistem pelaporan yaitu mengurangi tingkat ketidakpastian yang dihadapi dan yang mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara yang positif dalam menghadapi masalah. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maka perlu dilakukan pelaporan yang sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran. Pemerintah berkewajiban dalam memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik maka akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Surabaya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan semakin baik. Sebaliknya jika kejelasan sasaran anggaran rendah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun. (2) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan semakin baik. Sebaliknya jika kualitas sumber daya manusia rendah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun. (3) Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota

Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pelaporan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan semakin baik. Sebaliknya jika sistem pelaporan rendah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti antara lain: (1) Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian, tidak hanya pada OPD Kota Surabaya melainkan dengan memperluas ruang lingkup provinsi. Diharapkan juga menggunakan metode lain untuk memperoleh data secara lengkap dan jelas dengan melakukan wawancara secara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. (2) Bagi peneliti selanjutnya apat menambahkan variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian agar data yang dihasilkan lebih akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, M.F., W. Utami., Sunardi., dan Sudarsih. 2017. Kualitas Sumber Daya Manusia, Profesionalisme Kerja, dan Komitmen Sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten Jember. *E-journal ekonomi bisnis dan akuntansi* (4)1: 131-135
- Arifin. B. 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Investasi* 13(1): 15-27
- Arsyati. 2008. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBK Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi. *Tesis*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. 9(2): 1092-2022
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta
- Destriyani, V. 2015. Pengaruh Good Governance, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jom FEKON* 2(2): 1-24
- Fathia, A. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Study Kasus SKPD di Provinsi Riau). *JOM Fekom* 4(1): 1-34
- Fauzan, R. H. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat). *JOM Fekom* 4(1): 40-56
- Fitriana, R. D., N. Hidayati, M. C. Marwadi. 2018. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. *E-JRA* 7(2): 90-120
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Cetakan Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayattullah, A. dan I. Herdjiono. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke. ISBN: 978-979-3649. 8(1): 9-30

- Juita, S. D. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. 8(5): 80-130
- Kharis. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 3(!): 10-40
- Laksana, A. P. dan B. D. Handayani. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765. 3(2): 1-24
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2003. *Akuntabilitas dan good governance*. LAN-RI. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kelima. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi., Syamsidar, dan D. Efendy. 2018. Pengaruh Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan* 2(2). ISSN 2549-3477. 3(4): 2623-1077.
- Pratama, R., H. Agustin, dan S. Taqwa. 2019. Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(1): 429-444.
- Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang. 3(1): 1-23
- Rahayu, N. L. S., N. L. G. E. Sulindawati, dan N. K. Sinarwati. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 2(1): 30-44
- Sibagariang, A. 2013. Pengaruh Kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang. 9(3): 90-130
- Sitinjak, M., Y. Hafizrianda, dan M. Asnawi. 2019. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. *Jurnal kajian ekonomi & keuangan daerah* 4(1): 44-60
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cetakan Kedua Puluh. Alfabeta. Bandung
- _____. 2016. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suhaesti, S. R. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran. Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *JOM Fekom* 3(1): 705-720.
- Wakhyudi. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Revisi)*. Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP. Jakarta
- www.surabaya.go.id. Diakses tanggal 25 Oktober 2019